Muhammad Thariq

Pemahaman Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilu 2019 di Sumatera Utara

Quick Submit

Quick Submit

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3130417310

Submission Date
Jan 16, 2025, 8:34 AM GMT+7

Download Date
Jan 16, 2025, 8:45 AM GMT+7

File Name
Jurnalis_Lokal_dalam_Peliputan_Pemilu_2019_di_Sumatera_Utara.pdf

File Size
860.8 KB

14 Pages

4,348 Words

28,836 Characters

9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 25 words)

Exclusions

- 24 Excluded Sources

Top Sources

8% Internet sources
1% Publications
4% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

8% Internet sources
1% Publications
4% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
zh.scribd.com		1%
2	Internet	
repository.unib.ac.id		<1%
3	Internet	
digilib.uinsgd.ac.id		<1%
4	Internet	
journal.iainlhokseumawe.ac.id		<1%
5	Internet	
repo.bunghatta.ac.id		<1%
6	Student papers	
Sriwijaya University		<1%
7	Publication	
Rohmat Darmawan. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Pilgub Ja...		<1%
8	Internet	
iph.ym.edu.tw		<1%
9	Internet	
karyailmiah.unisba.ac.id		<1%
10	Internet	
media.neliti.com		<1%
11	Internet	
id.123dok.com		<1%

12 Internet

nasional.kompas.com <1%

Jurnal Simbolika: Research and Learning in Comunication Study, 5 (2) Oktober 2019
ISSN 2442-9198 (Print) ISSN 2442-9996 (Online)
DOI: http://dx.doi.org/10.31289/simbollika.v5i2.2721
JURNAL SIMBOLIKA
Research and Learning in Comunication Study
Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika

Pemahaman Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilu 2019 di Sumatera Utara

Understanding of Local Journalists in Covering the 2019 Elections in Nort Sumatera

Muhammad Thariq* & Ribut Priadi
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi,
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Diterima: Juli 2019 Disetujui: Oktober 2019 Dipublish: Oktober 2019
*Coresponding Email: **muhammadthariq@umsu.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat pemahaman jurnalis lokal dalam peliputan Pemilu 2019 di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif menggunakan cara observasi dan wawacara mendalam dengan jurnalis media cetak *mainstream* jurnalis media *online* dan organisasi profesi. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman jurnalis lokal terhadap profesinya belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sehingga dimaknai peliputan Pemilu 2019 relatif masih sama dengan Pemilu 2014. Untuk itu simpulan penelitian jurnalis belum memanfaatkan momentum Pemilu guna meningkatkan pemahaman terhadap profesi sesuai harapan publik dan Dewan Pers kepada jurnalis agar menjadikan Pemilu sarana pendidikan politik, meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat dan berperan menyukseskan Pemilu yang berkualitas. Masih ada jurnalis sulit meninggalkan keberpihakan kepada kelompok pendukung dan kandidat Pilpres tertentu atas dasar kesamaan ideologi.
Kata Kunci: Jurnalis lokal, Demokrasi, Pemilu

Abstract

This study aims to look at the level of understanding of local journalists in the coverage of the 2019 Elections in North Sumatra. The method used is a qualitative-descriptive approach using observation and in-depth interviews with mainstream print media journalists, online media journalists and professional organizations. The results of the study show that local journalists' understanding of their profession has not shown significant encouraging developments so that the coverage of the 2019 Elections is relatively similar to the 2014 elections. For this reason, the journalists have not utilized the election momentum to increase their understanding of the profession in accordance with public expectations and the Press Council to journalists so that making Elections a means of political education, improving the quality of democratic society and contributing to the success of quality elections. There are still journalists who find it difficult to leave alignments with certain groups of supporters and candidates on the basis of ideological similarities.
***Keywords**: Local Journalists, Democracy, Elections*

How to Cite: Thariq, M. & Priadi, R. (2019). Pemahaman Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilu 2019 di Sumatera Utara. *Jurnal Simbolika*: *Research and Learning in Comunication Study*, 5 (2): 59-72

turnitin Page 5 of 18 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3130417310

PENDAHULUAN

Pemilu serentak 2019 yang berlangsung pada Rabu 17 April adalah "pesta demokrasi" yang paling rumit dalam sejarah Pemilu bangsa Indonesia, bahkan di dunia. Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla mengatakan kerumitan Pemilu mengacu pada banyaknya surat suara yang harus dicoblos masyarakat di bilik suara (*Kompas.com,* 21/8/2018).

Kenapa terumit? Karena orang memilih lima tingkatan, yaitu DPR nasional, tingkat 1, tingkat 2, DPD, dan presiden (Jokowi berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno). Lima kertas mesti dicoblos. Di dalam surat suara pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terdapat banyak nama calon. Sebanyak12 partai politik yang mengusulkan delapan orang di dalamnya. Semua pemilihan dilakukan secara bersamaan. Surat suara dan peserta Pemilu dari pemilihan DPRD hingga Presiden begitu banyak, maka perhitungan suara memakan waktu. Akhirnya, orang lebih antusias pada hasil pemilihan presiden dan *Quick Count*-nya dibanding DPR. Penghitungan kertas suara dan menyelesaikannya memakan waktu 1-2 hari penuh. Diduga akibat kelelahan, petugas PPS dan Polri banyak yang meninggal dunia.

Persoalan Pemilu 2019 menjadi tantangan bagi jurnalis di daerah (lokal) yang melaksanakan tugas peliputan Pemilu di Sumatera Utara. Persoalan pemahaman dan kesadaran jurnalis di daerah yang masih rendah menjadi sorotan Dewan Pers selaku lembaga resmi yang mengawal pelaksanaan kemerdekaan pers untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang demokratis dan berkemajuan. Dewan Pers banyak menerima keluhan dari berbagai daerah dan berujung pada sengketa pers. Faktor penyebabnya tidak lain karena minimnya pemahaman jurnalis pada profesinya. Untuk itu pemahaman jurnalistik yang mumpuni sangat dibutuhkan oleh para jurnalis dalam melaksanakan tugas peliputan agar sukses menjalankan fungsi pers, yakni memberikan informasi, pengawasan, mendidik dan menghibur masyarakat (Grubenmann & Meckel (2015). Pers memiliki peran untuk membentuk pendapat umum, sekaligus sebagai ruang publik *(Publik Sphere)* yang menyediakan tempat kepada anggota masyarakat untuk berimprovisasi dalam penyampaian pikiran dan pendapat (Suharyanto, 2016).

Tanpa pemahaman pada profesi, jurnalis dan media akan menghadapi kendala dan cenderung menyimpang dari fungsi jurnalisme dalam rangka memenuhi amanah masyarakat termasuk melakukan

kontrol sosial dalam segala aspek kehidupan sosial politik, ekonomi dan sosial-budaya. (Sherwood & O'Donnell, 2016).

Pemahaman yang memadai tentang ideologi jurnalisme akan berdampak terhadap peliputan Pemilu 2019 yang mencerdaskan masyarakat di daerah. Jurnalis terombang-ambing pada kepentingan calon dan kelompok politik tertentu yang pada akhirnya meruntuhkan independensi, profesionalisme dan idealisme. Tidak hanya itu, peliputan jurnalis tidak memenuhi harapan sebagaimana tujuan Pemilu tersebut diselenggarakan.

Dalam jurnalisme terkandung idealisme. Ada suatu ideologi, yaitu usaha memberikan informasi untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana disampaikan Harcup & O'Neill (2016). Siregar dalam *Kompas* (2013) mengatakan dalam jurnalisme terdapat prinsip independensi dan netralitas yang harus ditegakkan. Independen dalam arti merdeka melaksanakan ideologi jurnalisme, sedangkan netral artinya berimbang, akurat, tak memihak kecuali demi kepentingan publik. Itu sebabnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers mengharuskan wartawan Indonesia harus bers sikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.

Apakah jurnalis lokal telah membekali diri dengan pemahaman yang memadai tentang ideologi jurnalisme dan KEJ serta menerapkannya dalam setiap kerja jurnalistik dalam melakukan peliputan Pemilu 2019? Rumusan di atas menjadi dasar untuk dikemukakan pada penelitian dan relevan dengan realitas belakangan ini bahwa kemerdekaan pers banyak disalahartikan dalam kerja jurnalisme di lapangan dan ruang redaksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengungkap gambaran yang riil tentang tingkat pemahaman jurnalis lokal dalam melaksanakan tugas peliputan Pemilu 2019 yang rumit dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Gambaran riil tentang tingkat pemahaman jurnalis lokal, apakah mereka mampu melewati berbagai tantangan yang diuraikan di atas. Harapannya melalui penelitian ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan sekaligus menjadi masukan bagi jurnalis serta lembaga profesi untuk meningkatkan kembali pemahaman jurnalis lokal pada profesinya. Dengan demikian peneliti berharap keberadaan jurnalis lokal memberikan kontribusi dalam menyukseskan Pemilu yang akan datang dengan menyajikan liputan berkualitas, di

samping menjadikan Pemilu sebagai momentum guna meningkatkan pemahaman terhadap profesi jurnalistik.

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan sebagai pusat operasional media cetak *mainstream* dan pusat koordinasi dalam penugasan jurnalis (cetak dan *online*) sampai pada penyebarluasan informasi ke daerah-daerah yang melaksanakan Pemilu 2019 di Sumatera Utara. Peneliti menggunakan jurnalis khusus peliput Pemilu dan PWI sebagai informan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap profesi dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*interview guide*) dan observasi dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang melibatkan informan (Bajari, 2015). Informan terdiri dari dua orang dari jurnalis cetak, satu jurnalis media *online* dan seorang pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 1) Tahap pengenalan masalah; 2) Tahap persiapan tindakan yang meliputi penyusunan jadwal penelitian, memastikan alat-alat yang diperlukan (misalnya pedoman wawancara) benar-benar telah selesai dibuat, penyiapan peralatan pendukung seperti *block-note*, *ball-point*, kamera, dan *tape recorder*, penyusunan subjek penelitian atau informan, mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk berita-berita Pemilu baik di media cetak maupun media elektronik dan *online*, keterangan-keterangan yang diperoleh dari interview dengan observasi serta membandingkan data yang diperoleh dari metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur sebagai pijakan teori untuk membantu di lapangan (Pujileksono, 2015).

Tahap penyusunan tindakan penelitian dilakukan secara berurutan dari rencana tindakan sampai dengan menemukan standar atau tingkat pemahaman dalam peliputan yang disebut juga dengan satu siklus penelitian (Creswell, 2010). Di satu siklus penelitian terdiri dari lima tahapan yang memfokuskan perhatian pada data di lapangan tentang (1) persiapan jurnalis untuk mempersiapkan liputan, (2) mengembangkan ide dan gagasan yang sesuai dengan agenda publik tentang Pemilu 2019, (3) bersikap independen, (4) menjaga objektivitas dan keberimbangan dan mematuhi kode etik. Empat poin di atas merupakan bagian dari penjabaran tiga model dan kategori kompetensi

jurnalis Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pers (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian secara umum yang mengacu pada standar kompetensi wartawan Indonesia yang ditetapkan Dewan Pers (2013), menunjukkan bahwa profesionalisme jurnalis lokal belum ada perkembangan yang menggembirakan secara signifikan, bahkan momentum Pemilu 2019 belum dimanfaatkan oleh jurnalis lokal untuk meningkatkan pemahamannya. Padahal harapan Dewan Pers dan publik kepada jurnalis agar menjadikan Pemilu 2019 sebagai momentum untuk memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat sehingga jurnalis berperan menyukseskan Pemilu yang berkualitas pula.

Pemahaman jurnalis lokal dalam peliputan Pemilu 2019 secara umum dapat dimaknai masih sama dengan Pemilu 2014 yang dilihat berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara mendalam kepada jurnalis serta PWI Sumatera Utara terkait tiga kategori pemahaman pada kompetensi yakni pertama, kesadaran (*awareness*) meliputi etika, hukum dan kepekaan jurnalistik; kedua, pengetahuan (*knowledge*) meliputi pengetahuan umum dan pengetahuan khusus serta teori dan prinsip jurnalistik dan ketiga, ketrampilan (*skills*) meliputi ketrampilan peliputan, riset, investigasi serta ketrampilan analisis dan arah pemberitaan.

Semua itu terlihat dalam bentuk liputan dan pemberitaan di media cetak dan media *online*. Begitu juga cara memilih pertanyaan, berita, gambar serta teks yang disiarkan tidak jauh berbeda, bahkan pada Pemilu tahun 2019, jurnalis sulit tidak berpihak kepada kelompok pendukung dan kandidat tertentu atas dasar kesamaan ideologi. Namun demikian PWI menilai tidak ada pelanggaran jurnalistik, walaupun publik meyakini adanya keberpihakan media dalam pemberitaannya. Dewan Pers juga tidak menerima laporan terkait pemberitaan media.

Uraian hasil penelitian secara umum di atas adalah cerminan bagaimana jurnalis lokal dapat melewati atau tidak mampu melewati secara maksimal beberapa kategori standar kompetensi jurnalis Indonesia. Dewan Pers (2013) menetapkan kompetensi yang dibutuhkan saat ini sebagai berikut: *Pertama*, Kesadaran (*awareness*) meliputi kesadaran etika, hukum dan kepekaan jurnalistik:

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sumatera Utara Hermansjah

mengatakan banyak jurnalis di Sumatera Utara yang melakukan peliputan Pemilu 2019 telah mengetahui ada kode etik dan ketentuan hukum, tetapi kesadaran jurnalis pada aspek tersebut belum menggembirakan atau belum ada kemajuan yang signifikan. Kurangnya kesadaran pada etika berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya. Sebagai pelengkap pemahaman etika, jurnalis dituntut untuk memahami dan sadar hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Padahal jurnalis wajib menyerap dan memahami Undang-Undang Pers, menjaga kerhormatan dan melindungi hak-haknya.

Selain kompetensi etik, kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi dalam konteks Pemilu 2019 di Sumatera Utara. Namun tetap saja jurnalis terpengaruh dan mencari cara untuk berpihak pada kelompok atau kandidat tertentu dengan cara tersembunyi dan terang-terangan.

Menurut Hermansjah, jurnalis peliput pesta demokrasi tidak terkecuali Pemilu tahun 2019 banyak tenaga muda atau pendatang baru. Mereka rata-rata belum terseleksi benar dari sisi pemahaman kode etik jurnalistik, sadar ketentuan hukum dan kepekaan jurnalistik dari tempat perusahaan mereka bekerja dan lembaga profesi. Ada pun beberapa jurnalis di Kota Medan yang mendapat pelatihan hanya yang khusus bertugas melaksanakan liputan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pelatihan kepemiluan, kesadaran etik, hukum dan kepekaan jurnalistik itu pun dalam durasi yang singkat dan minim. Tentunya hal itu dianggap belum dapat menjawab kepelikan dan kompleksitas persoalan Pemilu yang regulasinya terus berubah-ubah dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Persoalan itu juga menyertai tugas dan tuntutan di pundak jurnalis muda yang tidak ringan, yakni memberikan pendidikan politik dan meningkatkan mutu demokrasi masyarakat. Pendidikan politik dan demokrasi masyarakat hanya dapat ditingkatkan melalui karya jurnalistik yang berkualitas. Minimal karya jurnalistik memenuhi kategori standar kompetensi jurnalis Indonesia yang ditetapkan Dewan Pers (2013), sehingga kita optimis menghasilkan liputan Pemilu 2019 di Sumatera Utara yang bermutu pula.

Lewis (105) dalam Nasution (2015) menggambarkan terjadinya krisis otoritas dalam profesi jurnalisme sebagai dampak dari merebaknya media berjaringan digital atau *digitally networked media*. Tadinya jurnalisme mengontrol sampai tingkat tertentu suatu domain informasi, kini dunia telah berubah. Informasi tidak lagi langka atau susah diproduksi juga tidak sulit untuk didaur-guna *(repurpose*) dan dibagikan. Kini profesi ini tengah menghadapi persoalan batas kerja *(boundary of journalistic works*) dan wilayah keprofesian (*professional jurisdiction*) yang semakin samar karena amat banyak orang yang bukan jurnalis profesional mengerjakan bagian-bagian tertentu dari profesi jurnalisme seperti menulis berita, dan meliput peristiwa, meski belum sepenuhnya aktivitas jurnalisme diambil alih oleh non-jurnalis, namun gejala ini cukup berarti bagi keutuhan profesi.

Ronggur Simorangkir jurnalis muda peliput Pemilu dari Harian *Waspada* Medan mengakui pengetahuan dirinya tentang etik dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Kepemiluan dan jurnalistik masih minim.

"Pengetahuan etik dan hukum memang masih minim, saya sadari melemahkan kesadaran dan kompetensi etik, hukum dan kepekaan jurnalistik saya dalam memberikan informasi yang dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik yang memadai untuk menyukseskan Pemilu yang bermutu," kata Ronggur.

Begitu juga Amru Lubis, wartawan peliput Pilkada dan Pemilu 2019 dari Harian *Analisa* Medan mengatakan dia masih memiliki keterbatasan kompetensi etik dan hukum yang berkaitan dengan jurnalistik serta Pemilu yang aturannya berubah-ubah dan rumit sehingga membatasi pemahaman, menangkap dan mengungkap informasi tertentu yang dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistiknya. Dia mengaku pelatihan-pelatihan peliputan menghadapi Pemilu 2019 masih minim didapat dari KPUD, sedangkan dari dari perusahaan medianya, organisasi profesi jurnalis dan pemerintah sama sekali tidak ada.

Rahmat Utomo, jurnalis dan korespondensi muda peliput Pemilu di Sumatera Utara dari *Kumparan.com* mengaku hal yang sama. Dia jarang dibekali dengan pengetahuan etik, hukum jurnalistik dan Pemilu dari perusahaan medianya sendiri maupun KPUD, lembaga tertentu serta pemerintah daerah dan organisasi profesi khusus di Sumatera Utara.

"Saya mengetahui ada kode etik, ketentuan hukum berkaitan dengan jurnalistik dan ketentuan Pemilu, tetapi keberadaannya saya tahu sambil jalan dalam proses liputan dari bekerja di Harian *Waspada* Medan beberapa tahun dan keluar memilih bekerja di media online Kumparan. Saya tahu dari teman dan narasumber karena sama sekali tidak mendapat pembekalan khusus tentang kode etik dan ketentuan hukum itu, terutama saat memulai peliputan tahapan Pemilu mulai tahun 2018. Ya, memang minimnya kompetensi etik dan hukum terasa mempengaruhi kepekaan jurnalistik yang saya miliki terutama dalam mengungkap informasi atau isu tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik yang mendalam untuk Pemilu yang berkualitas, namun saya terus belajar," ujar Rahmat Utomo.

Ketiga jurnalis di atas mengakui faktor minimnya kesadaran dan kompetensi etik, hukum dan kepekaan jurnalistik berpengaruh pada liputan Pemilu yang profesional. Peliputan atas kompetensi jurnalis Indonesia di atas belum konsisten dilaksanakan oleh jurnalis.

Ronggur Simorangkir mengaku tahu ada kode etik dan ketentuan hukum jurnalistik, tetapi tetap sulit untuk tidak berpihak atau independen dari kelompok dan kandidat karena redaktur serta pemilik perusahaan media memiliki kedekatan dengan kelompok atau kandidat tertentu atas dasar ideologi media. Polarisasi media ini tidak terlepas atas dasar pengaruh dan tekanan kelompok masyarakat yang seideologi dengan medianya. Sementara Amru Lubis juga mengaku tahu ada kode etik dan ketentuan tentang hukum jurnalistik dan kepemiluan, tetapi karena minim kompetensi etik dan hukum yang dia peroleh menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu, maka terasa berat untuk melakukan asas keseimbangan dalam pembuatan berita. Publik tetap saja memiliki persepsi produk jurnalistiknya tidak seimbang.

Rahmat Utomo merasakan banyak teman-teman jurnalis lokal mencoba mengajak untuk berpihak dalam proses liputan bersama satu kelompok pendukung kandidat calon, namun dia mengaku tidak terpengaruh. Dasarnya dia tidak ingin menanggung beban berita tentang kegiatan kandidat calon gubernur tidak naik di medianya. Selain itu kedekatan dia dengan teman jurnalis yang berpihak tadi hanya sebatas agar komunikasi dengan teman jurnalis berjalan baik dan tukar-menukar informasi atau isu Pemilu.

Kedua, pengetahuan (*knowledge*): Pengetahuan umum (berbagai masalah

sosial, budaya, politik, hukum, sejarah serta ekonomi), pengetahuan khusus (berkaitan dengan liputan) dan pengetahuan teori tentang prinsip jurnalistik.

Jurnalis Indonesia dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum serta pengetahuan khusus. Jurnalis juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir pada bidangnya (Dewan Pers, 2013).

Hermansjah mengatakan kompetensi etik, hukum dan kepekaan jurnalistik sebenarnya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan pengetahuan teori tentang prinsip jurnalistik. Perdebatan-perdebatan antara jurnalis dengan kelompok pendukung dan kandidat kepala daerah serta isi produk jurnalistik mencerminkan kedangkalan pengetahuan jurnalis lokal. Pertanyaan dan karya jurnalistik minim menyentuh aspek sosial, budaya, politik, hukum, sejarah serta ekonomi secara luas. Wawasan jurnalis tidak sebanding dengan luas dan kayanya potensi serta persoalan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, baik dari aspek yang meliputi pengetahuan umum maupun aspek pengetahuan khusus dan pengetahuan teori/prinsip jurnalistik di atas.

"Jurnalis lokal masih enggan untuk menggali dan meng-*upadate* ilmu dan cenderung mempertahankan kebiasan yang lama, termasuk pengetahuan khusus yang berkaitan dengan bidang liputan. Ya, maunya jurnalis lokal mau memperbaharui teori dan prinsip jurnalistiknya saat Pemilu. Ada beberapa jurnalis mau update pengetahuannya, tetapi kemajuannya lambat," kata Hermansjah.

Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sumatera Utara melihat kemajuan yang melambat pada aspek ini tentu mempengaruhi profesionalisme jurnalis lokal. Menurut Hermansjah, kondisi ini menjadi perhatian organisasi profesi dan organisasi perusahaan media agar menghasillkan karya jurnalistik yang berguna untuk meningkatkan kualitas Pemilu.

Ketiga jurnalis di atas memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang kesadaran untuk menguasai pengetahuan (*knowlegde*). Mereka jarang mau mengukur pada tanggung jawab profesi terhadap masyarakat dan bangsa dengan berbagai macam argumentasi yang berkaitan dengan kondisi diri sendiri hingga menjadi jurnalis, kondisi organisasi profesi, perusahaan media serta kebijakan

pemerintah dan situasi politik di Tanah Air.

Ronggur Simorangkir mengatakan: "perlunya pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan pengetahuan teori/prinsip jurnalistik belum maksimal menjadi fokus saya yang harus saya persiapkan saat peliputan Pemilu 2018. Saya dapat penugasan peliputan Pemilu dii KPU dan partai politik pendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden memang tidak ada persiapan dan pembekalan untuk itu, ya saya laksanakan tugas tersebut kekurangan pengetahuan itu sambil jalan saya cari. Terpenting jika ditugaskan saya kerjakan dan beritanya ada, memang dengan cara seperti itu masih jauh dari profesional."

Sementara itu, Amru Lubis juga mengatakan: "fokus saya memang menyelesaikan peliputan dan membuat berita tentang Pemilu sebagai tugas rutinitas dan kita jarang jarang mengukur apakah dengan pengetahuan yang kita miliki akan berdampak pada kualitas berita kita, sehingga diyakini memang belum profesional secara maksimal selama peliputan Pemilu. Ya saya sadari belum maksimal pemahaman itu pada tugas profesi."

Begitu juga Rahmat Utomo mengutarakan**:** "pengetahuan itu sambil berjalan saya dapatkan dan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi peliputan Pemilu, sehingga saya sadari belum tetapi saya bertekad untuk terus menambah knowledge secara umum tentang etik, politik, hukum, sosial dan adat istiadat terutama terkait pemilu dan Sumatera Utara."

Ketiga, ketrampilan (*skills*): meliputi ketrampilan peliputan (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah serta menyampaikan informasi), ketrampilan riset dan investigas serta ketrampilan analisis dan arah pemberitaan.

Jurnalis mutlak menguasai ketrampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknik mewawancara dan teknik menyunting. Selain itu jurnalis harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi (Dewan Pers, 2013).

Hermansjah mengatakan ketrampilan jurnalistik pada jurnalis lokal masih belum berkembang dan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan sesuai tuntutan standar kompetensi jurnalis Indonesia. Hal itu terlihat dari persiapan peliputan sampai produk jurnalistik masih belum maksimal memberikan wawasan yang komprehensif tentang satu isu terutama isu Pemilu 2019 Sumatera Utara kepada

masyarakat. Penilaian ini sekaligus catatan Persatuan Wartawan Indonesia dalam setiap rekonstruksi kompetensi etik, hukum, kepekaan jurnalistik, penguasaan pengetahuan serta ketrampilan yang dilakukan jurnalis dalam setiap mengikuti tingkatan Uji Kompetensi Wartawan. Liputan yang tidak maksimal akan terlihat pada kualitas cara jurnalis melakukan wawancara kepada narasumber juga terbawa pada musim Pemilu.

Selain itu ketrampilan jurnalistik pada bidang menulis hingga melakukan analisis dan investigasi belum menjadi budaya jurnalis dan medianya. Itu juga terbawa-bawa pada peliputan dan penyajian karya jurnalistik pada Pemilu tahun 2014. Padahal sebenarnya berita analisis jurnalis tentang satu isu diperbolehkan asalkan keakuratan, independensi dan faktanya terjaga dengan baik. Liputan yang mendalam membutuhkan ketrampilan. Tuntutan ketrampilan tidak akan mungkin dapat dihasilkan jika jurnalis terkendala pada independensi, tidak maksimal pada kompetensi etik, hukum, kepekaan serta penguasaan pengetahuan. Untuk itu berita-berita yang beredar di media pada Pemilu lebih umum pada pemilihan berita lempang (*straight news*) minim sajian berita mendalam yang berbasis riset dan investigasi sehingga sulit dikatakan rata-rata jurnalis lokal melakukan peliputan secara profesional.

Ronggur Simorangkir mengaku menyampaikan informasi tentang isu Pemilu masih dalam bentuk berita lempang (*straight news*) dan minim berbasis analisis, riset serta investigasi. Mursal mengakui minim juga membuat perencanaan liputan yang komprehensif tentang isu Pemilu, selain disebabkan tidak ada penugasan dari redaktur juga ketrampilan jurnalistik masih perlu belajar.

"Perencanaan liputan tentang Pemilu jarang dilakukan dan kebanyakan berita-berita yang saya buat dalam bentuk *straight news* dari hasil wawancara dari narasumber komisioner KPU, *press release* yang diterima dari unsur partai politik dan kandidat calon presiden dan wakil presiden," kata Ronggur seraya mengakui belum profesional dalam peliputan Pemilu 2018 dan berniat untuk meningkatkan kompetensi salah satu cara ikut Uji Kompetensi Wartawan yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia.

Begitu juga Amru Lubis mengatakan melakukan liputan Pemilu dengan standar kompetensi memang penuh tantangan.

turnitin Page 15 of 18 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3130417310

"Memang, saya belum memanfaatkan momentum Pemilu semaksimal mungkin terkait dengan tuntutan meningkatkan pemahaman terhadap profesi melalui ketrampilan karya jurnalistik yang berguna untuk pendidikan politik dan meningkatkan demokrasi masyarakat. Tuntutan standar kompetensi itu memang penuh tantangan untuk dilaksanakan," kata Amru Lubis.

Rahmat Utomo juga mengatakan belum memanfaatkan Pemilu sebagai momentum meningkatkan pemahaman pada profesi karena masih terus belajar untuk mengembangkan ketrampilan jurnalistik. Artinya berita lempang masih dominan pada Pemilu daripada berbasis analisis, riset dan investigasi.

"Saya menyadari masih belum profesional pada peliputan Pemilu dan masih terus meningatkan ketrampilan jurnalistik, tetapi saya tetap *update* menyajikan informasi tentang isu Pemilu kepada publik," kata Rahmat.

Di Sumatera Utara pemahaman terhadap profesi jurnalisme masih menghadapi beberapa masalah dan berlaku sama secara nasional. *Pertama*, untuk sebagian wartawan masih belum dapat dikatakan sebagai pekerjaan penuh atau *full time job* karena masih banyak yang melakukannya dengan merangkap pekerjaan lain. Ini berkaitan dengan belum memadainya pendapatan/gaji sebagian besar wartawan. Survei Dewan Pers secara nasional tahun 2009 menunjukkan malah masih banyak gaji wartawan di bawah UMR. *Kedua*, tidak adanya proteksi terhadap profesi, sehingga semua orang bisa menjadi jurnalis karena tidak dikenal sistem lisensi. (Zulkarain, 2015). Ukuran memiliki pemahaman adalah mengedepankan kategori kompetensi jurnalistik Indonesia yang ditetapkan Dewan Pers (2013) belum terlaksana dengan baik oleh jurnalis lokal.

SIMPULAN

Pemahaman jurnalis lokal dalam peliputan Pemilu di Sumatera Utara tahun 2019 belum berkembang, bahkan praktiknya sama dengan Pemilu tahun 2014. Selain itu, masih terasa keberpihakan jurnalis dan media kepada kelompok atau kandidat terutama pada calon presiden dan wakil presiden tertentu yakni Jokowi-Ma'ruf Amin (Nomor Urut 1) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Nomor 2). Jurnalis lokal belum memanfaatkan Pemilu 2019 untuk meningkatkan pemahaman terhadap profesinya melalui karya jurnalistik yang berkualitas untuk memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kualitas demokrasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara yang telah memberikan informasi, data dan keterangan terkhusus kepada Ketua PWI Sumut Hermansjah. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada jurnalis khusus peliput Pemilu tahun 2019 Sdr Amru Lubis dari Harian Analisa di Kota Medan, Sdr Ronggur Simorangkir dari Harian Waspada di Kota Medan serta Rahmat Utomo dari Kumparan.com Jakarta koresponden Provinsi Sumatera Utara sekaligus peliput Pemilu 2019 bersedia menjadi informan aktif. Terakhir ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Agussani, MAP, Dr Muhammad Arifin Gultom, M.Hum, Wakil Rektor II Dr Akrim, M.Pdi, Wakil Rektor III Dr Rudianto, M.Si serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Dr Muhammad Said Siregar, S.Si., M.Si yang terus mendorong dan mendukung secara moril dan materil dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, S. (2011). Sikap Manusia; Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bajari, A. (2015). Metode Penelitian Komunikasi; Prosedur, Tren dan Etika. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Creswell, J.W. (2010). Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cazzamatta, R. (2018). The Determinants of Latin America's News Coverage in the German Press. Journal of International Communication. 24 (2):283-304.

Carmichael, V, Adamson, G, Sistter, K.C & Whitley. (2019). Media Coverage of Mental Illness: a comparison of citizen journalism vs. professional German Press. Journal of International Communication. 24 (2):283-304.

Carmichael, V, Adamson, G, Sistter, K.C & Whitley. (2019). Media Coverage of Mental Illness: a comparison of citizen journalism vs. professional journalism portrayl. Journal of Mental Health. 28 (5):520:526

Dewan Pers. (2013). Buku Saku Wartawan. Jakarta: Dewan Pers

Deuze, M. (2015). What Is Journalism? Professionali Identity and Ideology of Journalist Reconsidered, Journalism Journal. Sage Publications, 4 (6): 442-464

Grubenmann, S & Meckel, M. (2015). Journalist's Profesional Identity: A Resource to Cope With Change in The Industry? Journalism Studies Journal. 18 (6):732-748

Harcup, T. & O'Neill, D. (2016). What is News? News Values Revisited (again). Journalism Studies Journal. 18 (12): 147-158.

Ishwara, L. (2011). Jurnalisme Dasar. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kusumaningrat, H dan Kusumaningrat, P. (2009). Jurnalistik Teori dan Praktik. Bandung: PT Rosdakarya.

Kusmadi dan Samsuri. (2010). Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers. Jakarta: Dewan Pers

Nasution, Z, (2015). Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Priyambodo. (2012). Pedoman Uji Kompetensi Wartawan: Penerapan Standar Kompetensi Wartawan. Jakarta: Lembaga Pers Dr Soetomo.

Pujileksono, S. (2015). Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang: Intrans Publishing.

Sukardi, W.A. (2013). Standar Kompetensi Wartawan. Jakarta: Dewan Pers

Stanley. (2006). Etika Jurnalisme: Debat Global. Terjemahan Budi Prayitno. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat

Sherwood, M. & O'Donnell, P. (2016). Once a Journalist, Always a Jourlist? Industry

Restructure, Job Los and Professional. Journalism Studies Journal. 19 (7): 102-138

Pawito. (2008). Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta:PT LkiS

Siregar, A. (2013). Idealisme Jurnalis. Kompas. Jakarta. 21 Juli. Hlm.6.

Suharyanto, A. (2016), Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat, Jurnal Administrasi Publik, 6 (2): 123-136.